

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adams, Wahiduddin, *Kata Pengantar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-X/2012 Tanggal 27 Maret 2013)*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013)
- Anggraini, Yuli, *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*, (Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi)
- Armansyah, *Menjawab Tantangan Demografi*, (Jakarta: GUEPEDIA, 2019)
- Diding, *Kapasitas Forum Warga Sebagai Ruang Transaksi Sosial Dalam Perencanaan Studi kasus Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung*, (Bandung: Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives (IPGI), 2001)
- Huda, Ni'matul, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Manan, Abdul, *Politik Hukum (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, (Bandung, 13 Mei 2000)
- Mangkoesebroto, Guritno, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2000),
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992)
- Novianto, Widhi, *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2015)
- Prasetyia, Ferry, *Modul Ekonomi Publik Bagian I: Peran Pemerintah*, (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2012)

- Purnamasari, Diah, *Peraturan Lengkap Desa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Santoso, Soeroso, *Mengharusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2005)
- Sitorus E.B., dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, (Jakarta: DEPDAGRI, 2007)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Syamsudin, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Syarifuddin, Ateng, *Republik Desa*, (Bandung: Alumni, 2010)
- Wasistiono, Sadu, *Prospek pengembangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2006)
- Winamno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008)

2. Jurnal

- Botutihe, N., *Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Aloe Saboe Provinsi Gorontalo*, (PUBLIK: Jurnal Ilmu Administrasi, Vol (1), No. 6, 2017)
- Kurniawan, Robi Cahyadi, *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*, (Jurnal Fiat Justitia, Volume 10, Issue 3, Juli - September 2016)
- Pietersz, Jemmy Jefry, *Prinsip Good Governance dalam Penyalahgunaan Wewenang*, (Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 23, No. 2, 2017)
- Punu, Ester Juita, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, (Skripsi Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Unsrat, 2016)

Sumartono, *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2006)

Suprianto, *Fungsi Pemerintah dalam Pelayanan Publik (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar)*, (Jom FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 1 No. 2, 2014)

Susanto, Sri Nur Hari, *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*, (Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2, Juni 2019)

Syarifuddin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, (Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000)

Tatengkeng, Hopni, *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggraan Pemerintahan di Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan*, (Jurnal Eksekutif, Jurusan Ilmu Pemerintahan, , Volume 1, No. 1, 2018)

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah

Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4. Internet

<https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-des-Raperdes/> diakses 2 September 2021

<https://pelayananpublik.id/2020/06/02/apa-itu-demografi-manfaat-tujuan-variabel-komponen/> diakses tanggal 1 Agustus 2021

<https://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/> diakses tanggal 26 September 2021